

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern, berkembangnya perusahaan tidak lagi semata-mata diukur dari kemampuannya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan kini dituntut untuk memainkan peran yang lebih luas sebagai bagian dari ekosistem sosial, yaitu sebuah tanggung jawab yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Di Indonesia, CSR itu sendiri dipertegas secara hukum melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pada Pasal 74, mewajibkan perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Secara konsep, menurut standar internasional yang ditetapkan oleh *International Organization for Standardization* (ISO) 26000 mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab sebuah organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan melalui perilaku transparan dan etis.

Pandangan tentang CSR ini diperkuat oleh Kotler dan Lee (2005), yang menggambarkannya sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang bijaksana dan kontribusi sumber daya perusahaan. Archie B. Carroll (1991) melalui "Piramida CSR" membagi tanggung jawab perusahaan menjadi empat tingkatan fundamental yang saling mendukung yaitu ekonomi (kewajiban dasar untuk menghasilkan laba),

hukum (menaati peraturan perundangan), etis (bertindak adil, benar, dan tidak merugikan), dan puncaknya adalah filantropis (menjadi warga korporat yang baik dengan berkontribusi aktif pada masyarakat). Dengan demikian, CSR bukanlah sekadar kegiatan amal, melainkan sebuah tanggung jawab multidimensional yang melekat pada strategi dan operasional perusahaan modern, mencakup kewajiban yang diamanatkan oleh hukum hingga komitmen etis dan sosial yang lebih tinggi.

Sejalan dengan itu konsep *Triple Bottom Line* (TBL) yang diperkenalkan oleh John Elkington (1994) sebagai kerangka dasar dalam praktik CSR modern dengan menekankan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari aspek finansial (*profit*), tetapi juga dari kontribusinya terhadap manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*). Menurut perspektif Elkington, profit tidak semata dipahami sebagai keuntungan internal, melainkan juga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan lokal. Aspek *people* menekankan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjamin kesejahteraan karyawan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar melalui pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur. Sementara itu, aspek *planet* menekankan perlunya praktik bisnis ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah, pengurangan emisi, efisiensi sumber daya, serta pelestarian ekosistem. Dengan mengintegrasikan ketiga dimensi ini, perusahaan dapat mencapai keberlanjutan jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan (Elkington, 1994).

Seiring meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan, ketimpangan sosial, dan pembangunan berkelanjutan, CSR tidak lagi diposisikan sebagai aktivitas kedermawanan semata, tetapi sebagai strategi korporasi jangka panjang untuk membangun legitimasi sosial (*social license to operate*) dan memperkuat hubungan dengan masyarakat sekitar. Keberadaan CSR menjadi semakin penting dalam menjaga keberlanjutan hubungan antara perusahaan dan masyarakat, terutama di wilayah yang secara sosial dan ekologis rentan terhadap dampak aktivitas industri. Namun, di balik pertumbuhan program CSR, muncul berbagai kritik terkait efektivitas implementasinya, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Banyak program CSR dinilai hanya bersifat simbolik, *top-down*, dan gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat lokal (Rudito et al., 2023). Kegagalan ini kerap disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap konteks sosial budaya setempat, minimnya pelibatan komunitas, dan lemahnya ikatan kepercayaan antara perusahaan dan warga sekitar (Firdaus et al., 2024)

Sejalan dengan itu PT Tirta Investama Solok, sebagai bagian dari AQUA Group, juga aktif menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai strategi keberlanjutannya. Salah satu wujud implementasinya terlihat di kawasan Kayu Aro, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, melalui program konservasi kebun kopi yang bekerja sama dengan mitra pelaksananya yaitu *Human Initiative sumbar*. Program ini bertujuan untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sumber mata air. Dalam pelaksanaannya, program mendorong petani lokal untuk menerapkan sistem agroforestri, penanaman pohon penabung, serta praktik budidaya kopi yang ramah lingkungan, sekaligus

memperbaiki kualitas panen dan memperluas akses pasar melalui kolaborasi yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan program konservasi kebun kopi yang berbasis ekonomi ini, perusahaan umumnya menggunakan dua pendekatan utama, yaitu bantuan bergulir dan bantuan lepas. Bantuan bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada masyarakat atau kelompok dengan kewajiban pengembalian, sehingga dapat digulirkan kembali untuk penerima lain. Sebaliknya, Dalam pelaksanaan program CSR konservasi kebun kopi berbasis ekonomi di Nagari Batang Barus, PT Tirta Investama Solok menggunakan pendekatan bantuan lepas atau hibah sebagai strategi utama. Bantuan lepas ini diberikan tanpa kewajiban pengembalian, namun tetap diarahkan untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam jangka panjang. Melalui skema ini, perusahaan menyalurkan dukungan berupa fasilitas produksi, bibit kopi, dan pelatihan teknis agar masyarakat dapat mengembangkan usaha kopi secara mandiri. Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa masyarakat memerlukan dorongan awal untuk membangun kapasitas dan kesadaran kolektif sebelum mampu menjalankan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan demikian, bantuan lepas bukan semata bentuk pertolongan sesaat, tetapi menjadi langkah strategis dalam membangun fondasi pemberdayaan ekonomi sekaligus konservasi lingkungan di tingkat lokal.

Implementasi CSR PT Tirta Investama berawal dari pemikiran Riboud mengenai komitmen ganda perusahaan, yaitu menjalankan bisnis dengan menyeimbangkan antara keberhasilan ekonomi dan kemajuan sosial. Pemikiran ini sejalan dengan prinsip pendiri PT Tirta Investama, Tirta Utomo, yang meyakini

bahwa bisnis harus memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat. Gagasan tersebut diwujudkan melalui program AQUA Lestari yang dikembangkan sejak tahun 2006 sebagai bentuk keberlanjutan perusahaan dengan mengacu pada prinsip *Danone way*. Program ini dijalankan melalui berbagai inisiatif sosial dan lingkungan yang terintegrasi dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dari hulu, tengah, hingga hilir, yang disesuaikan dengan kondisi lokal tempat AQUA beroperasi. Seluruh kegiatan tersebut dijalankan melalui empat pilar utama, yaitu: pelestarian air dan lingkungan, praktik perusahaan ramah lingkungan, manajemen distribusi produk, serta keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat.

Program *corporate social responsibility* (CSR) konservasi kebun kopi yang dijalankan oleh PT Tirta Investama Solok didirikan sejak tahun 2019 yang merupakan salah satu inisiatif pelestarian lingkungan yang dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Strategi awal yang diambil perusahaan adalah dengan mendistribusikan bibit kopi kepada warga Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Bibit dibagikan kepada sebelas orang warga yang bersedia menjadi partisipan pada tahap awal, masing-masing menerima dua ratus bibit kopi untuk ditanam secara mandiri di lahan milik mereka. Namun, dalam kurun waktu 2019-2023, terjadi penurunan partisipasi yang signifikan dari sebelas partisipan awal, hanya tersisa tiga orang petani yang masih aktif merawat dan membudidayakan tanaman kopi.

Meskipun tanaman kopi berhasil tumbuh dan berbuah, proses pasca-panen yang dilakukan secara tradisional menyebabkan kopi hanya dapat dijual dalam bentuk biji mentah dengan harga sekitar Rp4.000 per kilogram, jauh dari potensi

nilai pasar kopi olahan. Keterbatasan ini bukan semata karena minimnya sumber daya, tetapi juga akibat belum terbangunnya kapasitas produksi dan manajemen usaha yang memadai di tingkat petani. Pada tahun 2023, LSM *Human Initiative* Sumbar sebagai pendamping program mereka memfasilitasi pembentukan rumah produksi kopi sebagai pusat pengolahan, edukasi, dan pengembangan kapasitas petani hingga terbentuk satu kelompok petani konservasi kopi yang kini beranggotakan dua puluh satu orang, dengan pembagian peran dan kerja yang lebih jelas dan terarah. Sehingga rumah produksi ini memungkinkan masyarakat untuk mengolah kopi hingga menjadi produk siap konsumsi yang bernilai jual lebih tinggi, bahkan berpotensi masuk dalam kategori *specialty coffee* atau kopi berstandar tinggi.

Pada tahun 2023, LSM *Human Initiative* Sumbar sebagai mitra pendamping memfasilitasi pembentukan rumah produksi kopi dan pembentukan kelompok petani konservasi yang beranggotakan dua puluh satu orang. Namun, meskipun telah ada fasilitas dan pembagian peran yang jelas, partisipasi masyarakat dalam mengelola rumah produksi tidak berjalan secara kolektif dan mandiri. Sistem yang diterapkan hanya membagi anggota ke dalam jadwal piket tiga orang per hari. Lebih jauh, keberlangsungan kegiatan di rumah produksi sangat bergantung pada pendamping dari LSM *Human Initiative* Sumbar yang hampir selalu hadir di lapangan untuk mengarahkan kerja. Ketika pendamping tidak berada di lokasi, kelompok tani yang dijadwalkan bertugas pun sering kali tidak hadir. Fenomena ketergantungan ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang efektivitas model pendampingan yang diterapkan.

Berbagai studi telah menekankan pentingnya partisipasi dalam keberhasilan program CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Suhadi (2020) menunjukkan bahwa peran pendamping memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program CSR. Penelitian ini memperlihatkan adanya hubungan kuat antara peran fasilitasi, edukasi, dan representatif pendamping dengan tingkat partisipasi masyarakat. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan program CSR, sebab masyarakat cenderung masih bergantung pada arahan dari pihak pendamping atau perusahaan. Dengan kata lain, kehadiran pendamping memang meningkatkan partisipasi teknis masyarakat, tetapi belum sepenuhnya mampu menumbuhkan kemandirian komunitas.

Sementara itu, penelitian oleh Firdaus dan Sri Murlianti (2024) menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program CSR, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil, hingga evaluasi. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cenderung meningkat pada tahap pelaksanaan dan menikmati hasil, namun masih terbatas pada pelibatan fisik dan kegiatan rutin, belum pada partisipasi substantif seperti perumusan keputusan dan pengawasan program. Pola tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat sering kali masih bersifat instruktif dan bergantung pada perusahaan, bukan partisipasi otonom yang tumbuh dari kesadaran dan kapasitas internal. Di sisi lain, Azis Amriwan (2021) melalui penelitiannya program pemberdayaan masyarakat pesisir di Palabuhan ratu masih bersifat charity dan stimulus sementara, belum menyentuh akar persoalan sosial dan struktural yang menyebabkan

kemiskinan nelayan. Dominasi aktor-aktor kuat seperti juragan dan lemahnya keagenan masyarakat menyebabkan ketergantungan struktural yang berulang dalam praktik pemberdayaan. Amriwan menegaskan bahwa pemberdayaan seharusnya membuat masyarakat menjadi subjek perubahan, bukan sekadar penerima manfaat program.

Berdasarkan fenomena ini, penelitian ini berupaya melihat bagaimana komunikasi maupun hubungan yang terbentuk dalam program pemberdayaan ini. Apakah rendahnya partisipasi dan tingginya ketergantungan masyarakat disebabkan oleh model pendampingan LSM yang bersifat instruktif dan tidak partisipatif, sehingga gagal membangun rasa memiliki dan kemandirian Atau hal ini justru merefleksikan karakteristik sosial-budaya masyarakat setempat yang mungkin telah memiliki pengalaman kurang baik dengan program-program eksternal sebelumnya, atau adanya struktur sosial internal yang tidak mendukung partisipasi kolektif. Bahkan, sangat mungkin bahwa akar permasalahannya terletak pada interaksi yang tidak ideal antara kedua belah pihak dimana skema pendampingan yang *top-down* yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat bertemu dengan masyarakat yang kurang diikutsertakan dalam perencanaan sejak awal, sehingga melahirkan sikap apatis dan ketergantungan.

1.2 Rumusan Masalah

Keberadaan perusahaan berbasis sumber daya alam seperti PT Tirta Investama di Solok membawa dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mendukung kesejahteraan lokal, perusahaan ini mengimplementasikan

program *corporate social responsibility* (CSR) konservasi kebun kopi sejak 2019. Program ini awalnya memadukan tujuan ekologis dengan melestarikan kawasan sumber air dengan pemberdayaan ekonomi melalui budidaya kopi. Namun, realisasi program menunjukkan fluktuasi partisipasi yang mencolok, dari sebelas partisipan awal yang menerima bibit kopi, hanya tiga orang yang bertahan hingga 2023 sebelum dilakukan restrukturisasi. Ditambah dengan lemahnya partisipasi kolektif dari masyarakat yang ketergantungan dengan pendamping sehingga membuat rumah produksi kopi tidak berjalan secara maksimal. Fenomena ini mengindikasikan dan diduga kuat bahwa keberhasilan program tidak hanya mungkin ditentukan oleh desain program dan hasil ekonomi, tetapi juga erat kaitannya dengan kualitas hubungan antara mitra pendamping dan masyarakat dan menjadi faktor penting dalam proses pemberdayaan. Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis sejauh mana peran pendamping mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program CSR berbasis konservasi sangat bergantung pada dinamika antara pendamping sebagai fasilitator eksternal dengan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan. Posisi penelitian yang berbeda dari studi terdahulu yang cenderung fokus pada efektivitas teknis atau dampak terukur CSR, karena penelitian ini justru menempatkan fokus pada proses sosial yang terjadi di balik implementasi program. Oleh karena itu, rumusan masalah utama yang ingin dijawab adalah "Bagaimana peran pendamping LSM *Human Initiative* dalam membangun partisipasi

masyarakat pada Program CSR Konservasi Kebun Kopi PT Tirta Investama di Nagari Batang Barus?"

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis peran pendamping LSM *Human Initiative* dalam membangun partisipasi masyarakat pada Program CSR Konservasi Kebun Kopi PT Tirta Investama di Nagari Batang Barus.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mendeskripsikan proses (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi), strategi, serta kelemahan pendampingan yang dilakukan oleh LSM *Human Initiative* dalam setiap tahapan Program CSR Konservasi Kebun Kopi.
2. Untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan CSR konservasi kebun kopi serta menemukan faktor-faktor yang memengaruhi munculnya ketergantungan atau kemandirian masyarakat terhadap pendamping.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi, khususnya dalam studi tentang tanggung jawab lingkungan sosial perusahaan (CSR) dan partisipasi masyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai dinamika sosial dalam pemberdayaan masyarakat oleh sektor swasta, serta

menunjukkan bagaimana peran pendamping mempengaruhi keberhasilan suatu program CSR.

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin memahami hubungan antara perusahaan, komunitas lokal, dan partisipasi dalam konteks pembangunan sosial berbasis komunitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi perusahaan, khususnya PT Tirta Investama Solok, tentang partisipasi masyarakat terhadap program CSR konservasi kebun kopi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan program ke depan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan kolaboratif antara perusahaan dan masyarakat, terutama dalam penguatan program berbasis keberlanjutan dan partisipasi sosial.
3. Diharapkan penelitian ini dapat mendorong mitra pelaksana CSR serta tokoh masyarakat lokal untuk lebih memahami pentingnya membangun komunikasi sosial yang inklusif, guna menciptakan program yang lebih efektif dan berjangka panjang.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu konsep di mana perusahaan secara sukarela maupun sebagai bentuk kewajiban berperan serta dalam

pembangunan sosial dan lingkungan di luar kepentingan bisnis semata. CSR mencerminkan tanggung jawab etis suatu perusahaan terhadap berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan lingkungan hidup, guna menciptakan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. CSR tidak hanya terbatas pada kegiatan amal atau donasi, melainkan mencakup praktik-praktik perusahaan yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis. Dalam praktiknya, CSR menjadi strategi perusahaan untuk membangun legitimasi sosial (*social license to operate*), meningkatkan citra positif, serta menjaga kesinambungan operasional perusahaan melalui partisipasi aktif dalam pembangunan komunitas sekitar (Fitriadi, 2020). Implementasi CSR didasari oleh kesadaran bahwa perusahaan tidak hanya mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat dan lingkungan tempat mereka beroperasi (Nadirah, 2020).

Menurut Archie B. Carroll (1991), CSR mencakup empat tanggung jawab utama perusahaan, yaitu tanggung jawab ekonomi (*economic responsibility*), tanggung jawab hukum (*legal responsibility*), tanggung jawab etis (*ethical responsibility*), dan tanggung jawab filantropis (*philanthropic responsibility*). Keempat dimensi ini menempatkan CSR sebagai aktivitas yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, tetapi juga mengedepankan kepatuhan hukum, nilai-nilai moral, dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat secara luas. Tujuan utama CSR adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan sosial masyarakat. Program CSR idealnya tidak hanya memberikan manfaat material, tetapi juga membangun kepercayaan,

legitimasi, dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan komunitas lokal. Menurut Ziegler (2014), pelaksanaan CSR yang baik akan menciptakan nilai bersama (*shared value*) yang berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi komunitas. Oleh karena itu, keberhasilan CSR tidak diukur dari besarnya dana yang dikeluarkan, melainkan dari sejauh mana program tersebut dapat diterima, dimaknai, dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, CSR memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi yang disebut GCG yaitu *good corporate goverment*, antara lain keberlanjutan (*sustainability*), keterlibatan masyarakat (*community involvement*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), mandiri (*independent*), Kesetaraan (*fairnes*) dan transparansi. Prinsip-prinsip ini bertujuan agar pelaksanaan program tidak bersifat *top-down*, melainkan partisipatif dan kontekstual dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi menjadi kunci untuk membangun rasa memiliki dan kepercayaan sosial terhadap program CSR. Apabila prinsip ini diabaikan, maka CSR berpotensi hanya menjadi proyek simbolik yang tidak menyentuh akar persoalan sosial di masyarakat (Pranawukir & Sukma, 2021).

CSR dapat dilaksanakan melalui berbagai pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan *top-down*, di mana program disusun dan dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan tanpa pelibatan aktif masyarakat. Pendekatan ini sering kali tidak sesuai dengan konteks lokal dan berisiko ditolak atau tidak didukung oleh komunitas. Sebaliknya, pendekatan partisipatif (*bottom-up*) melibatkan masyarakat sejak awal sebagai subjek aktif yang menentukan arah dan bentuk program. Pendekatan ini

dianggap lebih efektif dalam membangun kepercayaan sosial dan memastikan keberlangsungan program, terutama pada wilayah dengan struktur sosial yang kuat seperti di komunitas agraris. Kepercayaan sosial menjadi landasan penting dalam interaksi sosial dan ekonomi, mempengaruhi partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pengembangan, termasuk *Corporate Social Responsibility* yang diinisiasi oleh perusahaan (Kafaa, 2020).

Namun demikian, pelaksanaan CSR tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Dalam beberapa kasus, CSR ditolak atau tidak mendapat respon positif dari masyarakat karena dianggap sebagai bentuk pencitraan perusahaan semata. Kurangnya transparansi, komunikasi yang tidak efektif, serta pengalaman buruk terhadap program sebelumnya menjadi faktor penyebab munculnya resistensi sosial. Masyarakat tidak memaknai CSR sebagai upaya kolaboratif, melainkan sebagai intervensi luar yang mengancam nilai dan kedaulatan sosial mereka. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk membangun komunikasi yang terbuka dan memahami konteks sosial-budaya masyarakat sebelum menjalankan program CSR (Nurjanah, 2021).

Fenomena *Corporate Social Responsibility* menjadi semakin penting dalam agenda perusahaan modern. Karena pada dasarnya, CSR adalah gagasan yang dapat berdampak positif bagi perusahaan dan masyarakat. Perusahaan perkebunan yang menjalankan kegiatan usahanya sudah seharusnya melaksanakan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, apalagi jika kegiatan usaha tersebut bersinggungan dengan sumber daya alam. Tanggung jawab sosial

perusahaan menjadi isu penting karena masyarakat menaruh harapan besar kepada perusahaan untuk mewujudkan komitmen melalui tindakan nyata (Fitriadi, 2020).

Dalam konteks penelitian ini, CSR PT Tirta Investama Solok melalui program konservasi kebun kopi merupakan wujud tanggung jawab perusahaan dalam menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sumber air. Program ini menekankan kemitraan dengan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan yang melibatkan lembaga pendamping, yaitu LSM *Human Initiative*.

1.5.2 Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan konsep penting dalam CSR yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi suatu program. Dalam konteks ini, partisipasi bukan hanya diartikan sebagai kehadiran fisik, tetapi juga mencakup pengambilan keputusan, kontribusi ide, serta peran dalam mengontrol jalannya program agar sesuai dengan kebutuhan lokal. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk aktualisasi dari hak dan tanggung jawab sosial warga negara dalam mengelola sumber daya dan menyelesaikan masalah bersama. Menurut Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi dapat dibedakan dalam empat aspek: partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin besar kemungkinan program akan berkelanjutan dan diterima oleh komunitas.

Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan struktural. Studi Winata dan Yuliana (2012)

menunjukkan bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat dalam program konservasi sangat ditentukan oleh hubungan yang terbangun antara pelaksana program dan masyarakat lokal. Apabila masyarakat merasa program hanya dijalankan secara *top-down* tanpa ruang dialog, maka partisipasi cenderung bersifat pasif atau formalitas belaka. Sebaliknya, apabila masyarakat dilibatkan sejak awal dan merasa memiliki program tersebut, maka partisipasi akan bersifat aktif dan sukarela yang mana nantinya partisipasi akan menjadi lebih mandiri.

Dalam konteks program CSR konservasi kebun kopi oleh PT Tirta Investama Solok, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program. Partisipasi tidak hanya akan diukur dari jumlah kehadiran atau keterlibatan formal masyarakat, tetapi juga dari seberapa jauh mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi akan keberlanjutan program. Dengan demikian, konsep partisipasi ini akan menjadi acuan dalam menilai bentuk, tingkat, serta kualitas partisipasi masyarakat. Partisipasi dipahami bukan sebagai fenomena yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil dari bagaimana masyarakat menumbuhkan rasa memiliki dalam program sehingga mereka dapat berpartisipasi dengan sendirinya. Oleh karena itu untuk mengukur partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat diukur melalui keterlibatan mereka dalam setiap tahap program CSR konservasi kebun kopi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi serta sejauh mana partisipasi tersebut tumbuh secara mandiri tanpa ketergantungan pada pendamping.

1.5.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam mengontrol sumber daya, membuat keputusan, serta mengarahkan perubahan yang memengaruhi kehidupan mereka. Secara etimologis, istilah pemberdayaan berasal dari kata *empowerment*, yang berarti memberikan atau meningkatkan *power* (kekuatan) kepada pihak yang lemah agar mampu mandiri. Menurut Ife (2013), pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kekuasaan sosial, politik, ekonomi, dan psikologis masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Dengan demikian, pemberdayaan tidak sekadar bantuan material, tetapi proses panjang membangun kapasitas dan kesadaran kritis masyarakat.

Dalam konteks pembangunan sosial, Chambers (1994), menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan upaya *“putting the last first”*, yaitu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama (*subject*) dalam menentukan arah dan bentuk pembangunan mereka sendiri. Pandangan ini menolak pendekatan *top-down* yang selama ini menempatkan masyarakat hanya sebagai penerima manfaat. Pemberdayaan menuntut adanya perubahan paradigma dari yang semula berbasis bantuan menuju peningkatan kemandirian, dari ketergantungan menuju kontrol atas keputusan dan sumber daya. Pemberdayaan juga harus dilihat sebagai proses yang berorientasi pada kemandirian.

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari pendampingan sebagai mekanisme fasilitasi sosial. Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa peran pendamping adalah menggerakkan potensi masyarakat

melalui pendekatan partisipatif, edukatif, dan advokatif. Pendamping berfungsi bukan sebagai pelaksana program, tetapi sebagai katalis yang menumbuhkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk bertindak atas kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada kualitas interaksi antara pendamping dan masyarakat apakah hubungan tersebut bersifat partisipatif atau justru instruktif.

Dalam konteks program CSR konservasi kebun kopi PT Tirta Investama Solok, pemberdayaan masyarakat diarahkan pada dua tujuan utama, yaitu meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan, dan pemasaran kopi agar masyarakat memperoleh nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu pemberdayaan ini juga menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab kolektif masyarakat terhadap pelestarian lingkungan sumber air dan kawasan hutan. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji bagaimana peran pendamping LSM Human Initiative dalam membangun partisipasi yang benar-benar mengarah pada kemandirian masyarakat, bukan sekadar keterlibatan semu.

1.5.4 Konsep Peran dan Model Pendampingan dalam Pemberdayaan

Pendampingan merupakan elemen krusial dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan, kesadaran, dan tindakan kolektif menuju kemandirian sosial. Secara konseptual, pendampingan dapat dipahami sebagai proses sosial yang bersifat edukatif dan partisipatif, di mana pendamping berperan membantu masyarakat untuk mengenali potensi, memahami permasalahan, serta mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Menurut Faizal (2018) dalam penelitiannya pendamping berfungsi sebagai

fasilitator yang menggerakkan potensi lokal, membangun kepercayaan diri masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran kritis agar warga mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Dengan demikian, pendamping bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan agen sosial yang membantu masyarakat bertransformasi dari posisi sebagai objek pembangunan menjadi subjek yang mandiri.

Peran pendamping dalam pemberdayaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga fungsi utama. Pertama, sebagai fasilitator, pendamping berperan membuka ruang dialog dan musyawarah untuk mengorganisasi masyarakat serta memetakan potensi dan masalah yang ada. Kedua, sebagai pendidik, pendamping berupaya mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar masyarakat memiliki kapasitas untuk bertindak dan mengelola sumber daya. Ketiga, sebagai advokat atau mediator, pendamping berfungsi menjembatani komunikasi antara masyarakat dan aktor eksternal, seperti pemerintah atau perusahaan, guna memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sejalan Nurkomala (2023) dalam yang menegaskan bahwa lembaga pemberdayaan berperan sebagai fasilitator, mediator, dan penggerak sosial (*dynamicator*) yang mampu mendorong terjadinya perubahan sosial di tingkat lokal.

Dalam praktiknya, pendampingan dapat dilakukan melalui berbagai model pendekatan sesuai dengan karakteristik masyarakat dan tujuan program pemberdayaan. Sasmita (2021) menjelaskan bahwa pendampingan yang efektif harus disesuaikan dengan konteks sosial dan kultural masyarakat agar mampu mendorong partisipasi yang inklusif. Model pertama adalah pendampingan

instruktif (direktif), di mana pendamping berperan dominan dalam mengarahkan kegiatan masyarakat. Pendekatan ini lazim digunakan pada tahap awal ketika kapasitas masyarakat masih terbatas, namun berisiko menciptakan ketergantungan. Model kedua adalah pendampingan partisipatif (non-direktif), di mana pendamping membuka ruang dialog, diskusi, dan refleksi bersama, sehingga keputusan diambil secara kolektif. Pendekatan ini dinilai paling ideal dalam membangun kemandirian jangka panjang. Sementara itu, model ketiga adalah pendampingan kolaboratif (kemitraan), yaitu ketika pendamping, masyarakat, dan pihak eksternal seperti perusahaan atau pemerintah bekerja sama sebagai mitra sejajar yang berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Dengan kata lain, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi juga oleh bagaimana pendamping berinteraksi dan membangun relasi sosial yang setara dengan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, peran pendamping dari LSM *Human Initiative* pada Program CSR Konservasi Kebun Kopi PT Tirta Investama di Nagari Batang Barus memiliki posisi strategis untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat. Pendamping diharapkan tidak hanya mengarahkan kegiatan secara teknis, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang membangun kesadaran kolektif serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap program. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya ketergantungan masyarakat terhadap pendamping, yang mengindikasikan bahwa model pendampingan yang diterapkan masih bersifat instruktif dibanding partisipatif. Oleh sebab itu, analisis terhadap peran dan model pendampingan ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana pendekatan yang

digunakan LSM memengaruhi tingkat partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam program CSR berbasis konservasi tersebut.

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Partisipasi Arnstein (*Ladder of Citizen Participation*) yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein (1969) sebagai kerangka analisis sosiologis. Teori ini relevan karena memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan kekuasaan antara masyarakat dan pihak berwenang dalam proses pembangunan atau pelaksanaan program sosial, termasuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR). Arnstein menegaskan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar keterlibatan formal, melainkan bentuk redistribusi kekuasaan (*redistribution of power*) yang menentukan sejauh mana warga memiliki kendali terhadap keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (Arnstein, 1969).

Dalam artikelnya yang berjudul *A Ladder of Citizen Participation*, Arnstein (1969) menguraikan bahwa partisipasi warga memiliki delapan tingkatan yang disusun menyerupai sebuah tangga (*ladder*), yang menggambarkan perbedaan derajat kekuasaan dan pengaruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Delapan tingkatan tersebut terbagi menjadi tiga kategori besar, yaitu *nonparticipation*, *tokenism*, dan *citizen power*.

1. *Manipulation* (Manipulasi) dan *Therapy* (Terapi) termasuk dalam kategori *nonparticipation*, di mana masyarakat hanya menjadi objek kebijakan. Pada tahap ini, partisipasi digunakan untuk melegitimasi keputusan pihak berwenang tanpa memberikan kekuasaan nyata kepada warga.

2. *Informing* (Pemberian Informasi), *Consultation* (Konsultasi), dan *Placation* (Penenangan) termasuk dalam kategori *tokenism*, yang menggambarkan bentuk partisipasi semu. Masyarakat mungkin diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pihak dominan.
3. *Partnership* (Kemitraan), *Delegated Power* (Kekuasaan yang Didelegasikan), dan *Citizen Control* (Kontrol Warga Penuh) termasuk dalam kategori *citizen power*, di mana masyarakat memiliki kekuasaan yang lebih besar, bahkan hingga kendali penuh atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan program (Arnstein, 1969)

Menurut Arnstein, semakin tinggi posisi masyarakat pada tangga partisipasi, semakin besar pula kekuasaan dan pengaruh mereka terhadap hasil program. Sebaliknya, semakin rendah tingkat partisipasi, semakin besar pula dominasi pihak eksternal seperti pemerintah, perusahaan, atau lembaga pelaksana. Dengan demikian, partisipasi sejati hanya dapat terwujud ketika masyarakat memiliki kapasitas untuk menentukan keputusan dan bukan sekadar dilibatkan secara simbolis.

Dalam konteks penelitian ini, teori Arnstein digunakan untuk menganalisis sejauh mana partisipasi masyarakat Nagari Batang Barus dalam Program CSR konservasi kebun kopi oleh PT Tirta Investama Solok benar-benar bersifat partisipatif atau masih berada pada level tokenisme. Teori ini juga relevan untuk memahami peran pendamping dalam meningkatkan kapasitas dan posisi tawar masyarakat dalam proses pengambilan keputusan program. Pendamping yang efektif seharusnya mampu membantu masyarakat naik ke tingkat partisipasi yang

lebih tinggi, yaitu dari sekadar konsultasi menuju kemitraan atau bahkan kontrol warga.

Dengan menggunakan kerangka teori Arnstein, penelitian ini dapat melihat partisipasi masyarakat secara lebih kritis, tidak hanya sebagai indikator kehadiran dalam kegiatan, tetapi sebagai refleksi dari relasi kekuasaan dan pemberdayaan sosial yang terjadi antara perusahaan, lembaga pendamping, dan masyarakat. Dengan kata lain, teori ini membantu mengukur apakah program CSR yang dilaksanakan telah mencapai bentuk *empowering participation* (partisipasi yang memberdayakan) atau masih terbatas pada *symbolic participation* (partisipasi formalitas).

1.5.6 Penelitian Relevan

Penelitian relevan mengacu kepada penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya serta memiliki kaitan dengan topik penelitian sebelumnya. Penelitian relevan memiliki fungsi sebagai sumber perbandingan dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan pencarian dari peneliti, didapatkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Faizal (2018)	Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Desa Mulang Maya)	Pendamping hanya berperan dalam aspek teknis-administratif, tidak membangun kemandirian masyarakat. Partisipasi masyarakat rendah akibat pendampingan yang tidak partisipatif.	Fokus pada peran pendamping, Menyoroti rendahnya partisipasi dan kemandirian, Metode kualitatif.	Konteks: pembangunan desa, Tidak membahas CSR, Pendamping berasal dari pemerintah desa.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Rina Suhandi & Djuara P. Lubis (2020)	Peran Pendamping Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Keberhasilan Program Corporate Social Responsibility (Kasus: Kader Posyandu “Cempaka”)	Peran pendamping (fasilitasi, edukasi, representasi) berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Namun, partisipasi tidak berbanding lurus dengan keberhasilan program.	Membahas peran pendamping dalam program CSR, Mengukur partisipasi masyarakat, Metode kuantitatif dan kualitatif	Konteks: kesehatan (posyandu), Pendekatan kuantitatif dominan, Tidak membahas kemandirian masyarakat
3	Azis Amriwan (2021)	Dinamika dan Hambatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi	Program pemberdayaan bersifat <i>charity</i> dan stimulus, belum menyentuh akar masalah struktural. Masyarakat tergantung pada akses (jaringan, modal, pengetahuan) dan terjadi dominasi oleh aktor kuat (juragan/taweu).	Fokus pada pemberdayaan masyarakat, Menggunakan pendekatan kualitatif, Menyoroti ketergantungan masyarakat pada aktor eksternal	Konteks: masyarakat pesisir dan nelayan, Teori: Strukturalisme Giddens, Tidak membahas peran pendamping secara spesifik
4	Machyuzar Firdaus & Sri Murlianti (2024)	Partisipasi Masyarakat Dalam Program CSR PT. Pertamina Hulu Mahakam ‘Petani Maju 4.0’ Di Kelurahan Sanipah	Partisipasi masyarakat bervariasi di setiap tahapan. Pada tahap pengambilan keputusan dan evaluasi, partisipasi cukup aktif dalam memberikan ide. Namun, pada tahap pelaksanaan, partisipasi lebih banyak berupa kehadiran dalam pelatihan dan penerapan instruksi, belum mandiri.	Sama-sama meneliti partisipasi masyarakat dalam program CSR perusahaan, Menggunakan kerangka partisipasi Cohen & Uphoff (perencanaan, pelaksanaan, manfaat, evaluasi), Menyoroti keterlibatan	Fokus: Penelitian ini fokus pada deskripsi partisipasi, sementara penelitian ini menitikberatkan pada peran pendamping sebagai variabel kunci. Temuan Utama: Firdaus dkk. menemukan partisipasi yang instruktif, sedangkan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				masyarakat dalam sektor pertanian berkelanjutan.	penelitian ini ingin menganalisis mengapa hal itu terjadi melalui sudut pandang pendampingan.
5	Riany L. Nurwulan, Nina Kurniasih, & Umihani (n.d.)	Pemberdayaan Masyarakat Program Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Lingkungan	Program CSR PT. Tirta Investama (Aqua) yang dilaksanakan oleh PKPU HI berhasil memandirikan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan ekologi melalui pendekatan <i>collective action</i> dan <i>networking</i> . Pendampingan komprehensif menjadi kunci keberhasilan.	Perusahaan yang Sama: Sama-sama meneliti CSR PT. Tirta Investama (Aqua), Konsep Pendampingan: Sama-sama menyoroti peran LSM (PKPU HI) sebagai pendamping, Tujuan Pemberdayaan: Sama-sama bertujuan untuk mencapai kemandirian masyarakat.	Temuan Penelitian ini menggambarkan kesuksesan pendampingan, sementara penelitian ini justru dilatarbelakangi oleh ketergantungan masyarakat pada pendamping di rumah produksi kopi, Fokus Analisis: Penelitian ini melihat hasil akhir pemberdayaan.

Sumber: Data Primer 2025

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan dalam penelitian merupakan suatu pemahaman tentang bagaimana sebagai seorang peneliti menggunakan sudut pandang yang tepat untuk memecahkan atau melihat nantinya permasalahan penelitian. Pemilihan metode

penelitian yang berbeda dapat mempengaruhi cara peneliti memahami dan mencari jawaban atas suatu permasalahan yang dipahami (Afrizal, 2019).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri didefinisikan sebagai salah satu metode penelitian ilmu sosial, pendekatan kualitatif menitik beratkan pada pengumpulan dan analisis data non-numerik, seperti kata-kata, kalimat, maupun tindakan manusia, baik yang diungkapkan secara lisan maupun tertulis (Afrizal, 2019). Penggunaan pendekatan ini memungkinkan untuk memahami secara mendalam proses dan peran pendamping dalam melaksanakan program CSR konservasi kebun kopi oleh PT Tirta Investama Solok. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap proses, dinamika, dan makna di balik fenomena ketergantungan masyarakat dan efektivitas pendampingan, yang tidak dapat diukur secara numerik. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana strategi dan metode pendampingan diterapkan serta bagaimana masyarakat memaknai dan meresponsnya, sehingga titik temu permasalahan dalam membangun partisipasi yang mandiri dapat diidentifikasi.

Sementara itu, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah deskriptif. Pemilihan tipe deskriptif bertujuan agar peneliti dapat menggambarkan fenomena yang dikaji secara menyeluruh, mendalam, dan apa adanya, berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai bentuk, baik lisan maupun tertulis. Dengan tipe ini, peneliti dapat menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif yang menjelaskan secara detail proses dan peran pendamping dalam melaksanakan program CSR konservasi kebun kopi oleh PT Tirta Investama Solok.

1.6.2 Informan Penelitian

Menurut pandangan Afrizal (2019) informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi, baik tentang dirinya sendiri, orang lain, kejadian, ataupun suatu hal tertentu yang dijabarkan kepada peneliti. Ada 2 kategori dalam menentukan informan yaitu :

1. Informan pelaku adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya sendiri, tindakannya, pikiran, interpretasi suatu makna atau tentang pengetahuannya.
2. Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu hal maupun kejadian, dan dapat disebut sebagai informan saksi.

Selain itu untuk mendapatkan suatu data, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu, peneliti menetapkan kriteria penelitian untuk menentukan siapa saja informan yang sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Sebelum melakukan penelitian, para peneliti harus menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi (Afrizal, 2019). Oleh sebab itu pada penelitian ini ditetapkan kriteria informan pelaku sebagai berikut:

1. Masyarakat atau petani yang berdomisili di Nagari Batang Barus yang terlibat dalam pelaksanaan program CSR konservasi kebun kopi.
2. Pendamping maupun lembaga swadaya masyarakat yang ada dalam pelaksanaan program CSR konservasi kebun kopi.

Sedangkan kriteria informan pengamat, ditetapkan dengan sebagai berikut:

1. Perangkat nagari Batang barus tempat pelaksanaan CSR.

2. Divisi CSR dari PT Tirta Investama Solok.

Tabel 1. 2 Tabel Informan Pelaku Pendamping

No.	Nama	Umur	Pend.	Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nando Jaya Putra	30	S1	Fasilitator Lapangan	Pelaku utama pendampingan harian (3,5 tahun)
2	Yozi Yuliardi	32	S1	Program Officer	Perancang strategi & money program
3	Pak Hendra	—	—	Koordinator HI Sumbar	Koordinasi kelembagaan

Tabel 1. 3 Tabel Informan Pelaku Peserta KEP Rumah Produksi Kopi

1	Syafrianti	39	SMP	Anggota	Anggota awal dan aktif piket harian
2	Afrida	50	SD	Anggota	Anggota awal dan aktif piket program
3	Rusnita	41	SLTA	Bendahara	Pengelola keuangan & mini cafe
4	Dorry Novembra	33	SMP	Ketua	Pemimpin kelompok
5	Ira Madanita	33	SMK	Sekretaris	Penggerak awal
6	Suci Fitri Santi	34	SMK	Anggota	Anggota awal
7	Trisna Levia	24	SMA	Anggota	Anggota termuda

Tabel 1. 4 Tabel Informan Pengamat

1	Azra'i	52	S1	Stakeholder Rel. Manager	Penentu kebijakan CSR (20 tahun)
2	John Betrit, S.Si	55	S1	Head CSR	Perancang indikator keberhasilan
3	Rahma Yuliza	45	—	Sekretaris Nagari	Perspektif pemerintahan nagari
4	Amral	52	—	Wali Jorong	Perspektif komunitas lokal nagari

1.6.4 Data yang Diambil

Dalam penelitian kualitatif, data yang akan dikumpulkan seperti kata-kata, kalimat, maupun tindakan manusia, baik yang diungkapkan secara lisan maupun tertulis berupa kata-kata yang tertulis maupun lisan termasuk tindakan-tindakan manusia tanpa mengubahnya menjadi data yang bersifat kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), data dalam penelitian diperoleh dari 2 jenis sumber yang mencakup berbagai informasi dalam mendukung penelitian yang akan dilakukan. Pembagian tersebut yaitu :

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari informan penelitian di lapangan. Data yang dikumpulkan merupakan informasi-informasi seperti hasil dari metode wawancara dan observasi didasarkan dari tujuan dan rumusan masalah penelitian.
2. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber lapangan. Biasanya peneliti dapat memperolehnya melalui bantuan media cetak atau digital baik berupa dokumen, buku, penelitian terdahulu, jurnal, berita, kajian Pustaka dan media lainnya yang mendukung data penelitian relevan.

1.6.5 Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data digunakan peneliti untuk memperoleh informasi, pemahaman dan wawasan mengenai topik yang akan diteliti (Afrizal, 2019). Berikut ini adalah teknik-teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam mencari data untuk menjawab permasalahan, peneliti dapat memanfaatkan panca indra untuk mengetahui, melihat, mendengar, dan merasakan apa yang terjadi di lapangan secara langsung. Dengan mengamati proses yang terjadi di masyarakat dengan pendamping.

2. Wawancara mendalam

Afrizal (2019) wawancara mendalam merupakan bentuk wawancara yang tidak menyediakan pilihan jawaban, tetapi lebih mengutamakan penggalian informasi dari informan secara mendalam. Pendalaman ini tidak berarti mengulang pertanyaan yang sama, melainkan mengajukan pertanyaan berbeda kepada informan yang sama, dengan tetap berpedoman pada tujuan penelitian, serta memanfaatkan atau memperluas penjelasan dari informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

3. Dokumentasi

Menurut Afrizal (2019) dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis seperti berita di media, notulen, surat-menyurat, dan laporan informasi yang terkait. Teknik ini memeriksa notulen rapat, laporan kegiatan, dan dokumen program untuk melacak proses pengambilan keputusan.

1.6.6 Unit Analisis Data

Dalam penelitian sosial, penentuan unit analisis yang jelas dan tegas sangat diperlukan agar fokus kajian dapat diarahkan dengan tepat. Unit analisis ini menentukan siapa atau apa yang menjadi titik pusat dalam pengumpulan dan

interpretasi data (Afrizal, 2019). Pada penelitian ini, unit analisis berada pada tingkat individu, yaitu anggota masyarakat Nagari Batang Barus yang terkait dengan pelaksanaan program CSR konservasi kebun kopi oleh PT Tirta Investama Solok. Pemilihan unit analisis ini memungkinkan peneliti memahami perbedaan pengalaman tiap individu seperti latar belakang sosial, posisi dalam kelompok tani, tingkat keterlibatan, dan hubungan dengan perusahaan atau mitra yang memengaruhi cara mereka berpartisipasi dalam program. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat partisipasi masyarakat dalam CSR konservasi kebun kopi.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses dari pengelolaan data agar menghasilkan sebuah informasi baru (Afrizal, 2019). Hal ini ditujukan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna sebagai solusi untuk permasalahan dalam penelitian. Tujuan dari analisis data adalah untuk menjelaskan data agar lebih mudah dimengerti, sehingga dapat dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman dalam (Afrizal, 2019) dengan 3 tahap yaitu:

1. Kodifikasi Data

Kodifikasi data merupakan tahap pengkodean atau pengklasifikasian data yang dilakukan peneliti setelah proses pengumpulan data. Jika data diperoleh dari catatan lapangan setelah pelaksanaan wawancara mendalam, maka peneliti terlebih dahulu menuliskannya kembali dan menyusunnya dengan sistematis.

Sementara itu, jika data diperoleh dari rekaman, peneliti perlu melakukan transkripsi dari rekaman tersebut. Setelah seluruh data dicatat atau ditranskripsikan, peneliti selanjutnya mengidentifikasi bagian-bagian informasi yang relevan dan signifikan dengan memberi kode atau penanda tertentu, guna memudahkan proses analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap lanjutan dari proses analisis, dengan tujuan untuk mengorganisasi data ke dalam bentuk yang jelas dan mudah dipahami. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan atau mengategorikan temuan dari lapangan berdasarkan pola atau tema tertentu. Mengacu pada Miles dan Huberman, dianjurkan untuk memanfaatkan matriks atau diagram guna memvisualisasikan data, sehingga dapat mempermudah pemaknaan dan interpretasi dari temuan yang diperoleh.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan temuan dari data lapangan yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, guna mendapatkan makna yang lebih mendalam dan menjawab pertanyaan penelitian. Untuk memastikan keabsahan dan kualitas kesimpulan, peneliti juga melakukan pemeriksaan ulang terhadap proses pengkodean dan penyajian data, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dan memastikan integritas analisis yang dilakukan (Afrizal, 2019).

1.6.8 Definisi Operasional Konsep

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, dibuatlah definisi operasional dari beberapa istilah kunci sebagai berikut:

1) *Corporate Social Responsibility* (CSR) Konservasi Kebun Kopi

CSR Konservasi Kebun Kopi didefinisikan secara operasional sebagai serangkaian kegiatan nyata yang dilakukan PT Tirta Investama Solok melalui mitra pelaksana *Human Initiative* Sumatera Barat di Nagari Batang Barus, yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani kopi. Indikator operasional dari konsep ini meliputi: (a) penyediaan bibit kopi arabika kepada petani, (b) pembangunan rumah produksi kopi beserta peralatannya (mesin pulper, roaster, pengemas), (c) penyelenggaraan pelatihan teknis budidaya dan pengolahan pascapanen, (d) keberadaan pendamping lapangan yang secara rutin mendampingi petani, serta (e) terbentuknya kelompok tani yang memiliki struktur organisasi dan kegiatan rutin. Kelima indikator ini diamati melalui wawancara dengan pihak perusahaan, pendamping, dan anggota kelompok, serta melalui observasi langsung di lokasi program.

2) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dioperasionalkan sebagai keterlibatan aktif warga Nagari Batang Barus, khususnya anggota Kelompok Ekonomi Petani (KEP) Konservasi Kopi Kayu Aro dalam setiap tahapan program CSR. Mengacu pada kerangka *Ladder of Citizen Participation* dari Arnstein (1969), partisipasi tidak hanya diukur dari kehadiran fisik, tetapi juga dari derajat kekuasaan dan pengaruh

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Secara operasional, partisipasi masyarakat diukur melalui indikator-indikator berikut: (a) kehadiran dan keterlibatan dalam pertemuan perencanaan program, (b) frekuensi dan kualitas usulan yang disampaikan masyarakat terkait arah program, (c) kepatuhan terhadap sistem piket harian di rumah produksi, (d) keterlibatan dalam proses evaluasi bulanan dan tahunan, (e) akses terhadap informasi keuangan kelompok dan dokumen program lainnya, serta (f) kemampuan menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran tanpa kehadiran pendamping. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, peneliti menempatkan posisi partisipasi masyarakat pada salah satu dari delapan tangga Arnstein, mulai dari manipulation (nonpartisipasi) hingga citizen control (kekuasaan penuh warga).

3) Peran Pendamping

Peran pendamping didefinisikan secara operasional sebagai tindakan, perilaku, dan strategi yang dilakukan oleh fasilitator lapangan dari *Human Initiative Sumatera Barat* dalam mendampingi kelompok tani. Indikator operasionalnya mencakup: (a) kehadiran pendamping di rumah produksi dan di lokasi kegiatan kelompok, (b) keterlibatan pendamping dalam pengambilan keputusan strategis seperti penentuan mitra pembeli atau perubahan jadwal piket, (c) sejauh mana pendamping mendelegasikan tugas kepada anggota kelompok tanpa intervensi langsung, (d) peran pendamping sebagai mediator antara kelompok dengan perusahaan dan pembeli (dilihat dari inisiatif kelompok atau pendamping dalam komunikasi eksternal), (e) upaya transfer keterampilan yang dilakukan pendamping melalui pelatihan atau pendampingan teknis, serta (f) ada tidaknya mekanisme

pelepasan tanggung jawab secara bertahap dari pendamping kepada kelompok. Indikator-indikator ini diamati melalui wawancara mendalam dengan pendamping, anggota kelompok, dan perusahaan, serta melalui observasi partisipatif terhadap interaksi sehari-hari.

4) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dioperasionalkan sebagai kondisi yang mencerminkan meningkatnya kapasitas individu dan kolektif kelompok tani dalam mengelola program secara mandiri, tanpa ketergantungan yang berarti pada pendamping eksternal. Indikator operasional pemberdayaan dalam penelitian ini adalah: (a) kemampuan kelompok mengambil keputusan operasional (misalnya jadwal piket, pembagian kerja, penanganan keluhan anggota) tanpa arahan pendamping, (b) kemampuan kelompok mengakses pasar dan bernegosiasi dengan pembeli tanpa perantara pendamping, (c) keberfungsian sistem administrasi dan keuangan kelompok secara transparan dan akuntabel tanpa campur tangan pendamping, (d) tumbuhnya inisiatif anggota untuk memperluas kebun atau meningkatkan kualitas produksi di luar instruksi program, serta (e) adanya rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap rumah produksi dan program, yang tercermin dari kesediaan anggota merawat fasilitas dan hadir pada kegiatan tanpa insentif material. Kelima indikator ini diukur melalui wawancara dengan anggota dan pengurus kelompok, serta observasi atas dinamika kelompok saat melakukan pendampingan.

1.6.9 Proses Penelitian

Penelitian ini mulai dirancang pada akhir tahun 2025 tepatnya di bulan september ketika peneliti mulai menentukan fokus penelitian yang berkaitan dengan kajian sosiologi pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Ketertarikan terhadap topik penelitian muncul setelah mengetahui adanya program CSR konservasi kebun kopi yang dijalankan PT Tirta Investama di Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek konservasi lingkungan, tetapi juga mengembangkan rumah produksi kopi sebagai bagian dari upaya hilirisasi hasil pertanian masyarakat.

Pada tahap awal, peneliti melakukan penelusuran informasi terkait program melalui dokumen perusahaan, media sosial *Human Initiative* Sumatera Barat, serta komunikasi awal dengan pihak *stakeholder* perusahaan. Dari proses tersebut, adanya dinamika menarik dalam pelaksanaan program, khususnya terkait kenapa partisipasi di sebuah kelompok yang dibawah binaan CSR ini tidak memiliki partisipasi yang konsisten. Fenomena ini kemudian mendorong penelitian ini untuk lebih jauh memahami bagaimana proses pendampingan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program CSR.

Sebelum turun lapangan, peneliti terlebih dahulu mengurus surat izin penelitian dari Departemen Sosiologi Universitas Andalas serta meminta izin kepada pihak-pihak terkait seperti perusahaan dan perangkat yang ada di Nagari Batang Barus. Setelah proses perizinan selesai, peneliti mulai melakukan

pendekatan dengan pendamping *Human Initiative* dan beberapa anggota kelompok tani kopi untuk membangun hubungan awal dengan informan penelitian.

Proses turun lapangan dilakukan secara bertahap sejak awal tahun 2025. Pada tahap awal, peneliti lebih banyak melakukan observasi terhadap aktivitas rumah produksi kopi dan mengikuti interaksi antara pendamping dengan anggota kelompok. Melalui observasi tersebut, peneliti mulai melihat bahwa aktivitas kelompok cenderung lebih aktif ketika pendamping hadir di lokasi. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa komunikasi informal yang memiliki peran penting dalam menjaga keterlibatan anggota kelompok dalam program.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pendamping *Human Initiative*, anggota kelompok tani kopi, pihak perusahaan, dan perangkat nagari. Proses wawancara tidak selalu berjalan mudah karena beberapa anggota kelompok memiliki kesibukan masing-masing sehingga peneliti harus menyesuaikan waktu wawancara dengan aktivitas informan. Selain itu, terdapat beberapa informan yang pada awalnya cenderung tertutup dan lebih berhati-hati dalam memberikan informasi terkait dinamika internal kelompok. Oleh karena itu, peneliti melakukan pendekatan secara informal dan bertahap agar informan merasa lebih nyaman selama proses wawancara berlangsung.

Pengumpulan data lapangan dilakukan dalam dua periode. Periode pertama berlangsung dari tanggal 15 November hingga 5 Desember 2025. Pada periode ini, peneliti melakukan observasi partisipatif di rumah produksi kopi dan wawancara mendalam dengan informan awal. Peneliti berhasil mewawancarai 10 informan, terdiri dari fasilitator lapangan *Human Initiative*, beberapa anggota kelompok tani,

dan pihak perusahaan. Kendala yang dihadapi selama periode pertama antara lain: (a) beberapa anggota kelompok awalnya enggan diwawancarai secara formal dan hanya bersedia berbincang santai, sehingga peneliti perlu melakukan pendekatan informal berulang kali; (b) kesibukan informan (terutama yang berprofesi sebagai petani) menyulitkan penjadwalan wawancara; (c) kondisi cuaca (hujan deras) terkadang mengganggu proses wawancara yang dilakukan di area rumah produksi yang terbuka. Peneliti mengatasi kendala tersebut dengan menyesuaikan waktu wawancara dengan kesediaan informan, melakukan pendekatan personal secara bertahap, serta memanfaatkan waktu senggang informan di sore atau malam hari.

Periode kedua pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2026. Tujuan periode ini adalah melengkapi informasi yang masih kurang dan melakukan triangulasi data. Pada periode ini, peneliti berhasil mewawancarai 4 informan tambahan, yaitu perangkat nagari (wali jorong dan sekretaris nagari) serta dua orang anggota kelompok yang sebelumnya belum diwawancarai. Secara keseluruhan, penelitian ini melibatkan 14 informan yang terdiri atas: 3 orang pendamping LSM *Human Initiative* (fasilitator lapangan, program officer, dan koordinator), 7 orang anggota Kelompok Ekonomi Petani (KEP) Konservasi Kopi Kayu Aro (termasuk ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota biasa), 2 orang dari pihak PT Tirta Investama Solok (*Stakeholder Relation Manager* dan *Head CSR*), serta 2 orang perangkat Nagari Batang Barus (wali jorong dan sekretaris nagari). Satu orang calon informan dari anggota kelompok yang menolak diwawancarai secara formal dengan alasan kesibukan, namun peneliti tetap memperoleh gambaran umum melalui percakapan informal.

Selama proses pengumpulan data, peneliti menghadapi keterbatasan dokumen pendukung. Kelompok tani tidak memiliki arsip tertulis seperti daftar hadir rapat bulanan, buku administrasi keuangan, atau dokumentasi foto kegiatan rutin. Selain itu, selama periode penelitian (November 2025 hingga Maret 2026), tidak ada rapat bulanan kelompok yang diselenggarakan, sehingga peneliti tidak dapat mengamati langsung forum evaluasi dan pengambilan keputusan kolektif. Untuk mengatasi keterbatasan ini, peneliti mengandalkan data wawancara mendalam sebagai sumber utama, serta melakukan observasi kegiatan harian di rumah produksi (seperti sistem piket dan proses pengolahan kopi). Dokumen sekunder yang berhasil dikumpulkan terbatas pada laporan eksekutif program dari PT Tirta Investama (tahun 2023-2025), Profil Nagari Batang Barus tahun 2024, serta dokumentasi foto tempat penelitian dan foto informan yang diambil langsung oleh peneliti. Arsip kelompok seperti absen kehadiran atau notulen rapat tidak tersedia.

Setelah pelaksanaan wawancara dengan Yozi Yuliardi (*Program Officer HI*) pada 25 Februari 2026, peneliti berupaya meminta sejumlah data pendukung guna melengkapi informasi mengenai perencanaan program, mekanisme monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi administratif lainnya. Peneliti melakukan konfirmasi lanjutan beberapa kali melalui pesan *WhatsApp* selama periode Maret hingga April 2026. Namun, hingga batas waktu penelitian, permintaan tersebut belum sempat terpenuhi. Yozi Yuliardi menyampaikan bahwa kesibukannya di lapangan mengingat ia bertanggung jawab menangani beberapa program sekaligus di berbagai wilayah Sumatera Barat menjadi kendala utama

untuk merespons permintaan data tambahan secara cepat. Peneliti juga telah mencoba menghubungi Pak Hendra (Koordinator HI Sumbar) sebagai atasan langsung, namun dengan hasil yang serupa. Peneliti memahami bahwa keterbatasan waktu dan beban kerja informan merupakan hal yang lumrah dalam penelitian lapangan. Sebagai kompensasi, peneliti memperkuat data dari sumber lain yang lebih mudah diakses, yaitu wawancara dengan fasilitator lapangan (Nando Jaya Putra), wawancara dengan Pak Hendra sendiri pada 4 Maret 2026, serta wawancara dengan anggota kelompok dan pihak perusahaan. Dengan demikian, meskipun dokumen tambahan dari level manajemen HI tidak tersedia, peneliti tetap dapat melakukan triangulasi dari berbagai sudut pandang informan.

Peneliti tetap melakukan triangulasi data dengan cara: (a) triangulasi sumber membandingkan informasi dari pendamping, anggota kelompok, perusahaan, dan perangkat nagari terhadap topik yang sama; (b) triangulasi teknik membandingkan hasil wawancara dengan observasi lapangan (misalnya, klaim tentang kehadiran piket diverifikasi dengan pengamatan langsung di rumah produksi). Meskipun ada keterbatasan dokumen, peneliti menilai data yang terkumpul telah mencapai titik jenuh, karena informasi dari wawancara mulai berulang dan tidak ditemukan tema baru. Pengumpulan data dihentikan pada Maret 2026. Selama penelitian berlangsung, peneliti juga menemukan bahwa hubungan sosial antara pendamping dan masyarakat sangat mempengaruhi keberlangsungan kelompok. Kehadiran pendamping lapangan tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator program, tetapi juga menjadi penggerak utama aktivitas kelompok sehari-hari. Temuan-temuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi peneliti untuk menganalisis bentuk partisipasi

masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketergantungan kelompok terhadap pendamping dalam program CSR konservasi kebun kopi di Nagari Batang Barus.

1.6.10 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian seringkali diartikan sebagai setting atau konteks sebuah penelitian. Lokasi penelitian tidak hanya sebatas tentang titik letak wilayah saja tetapi juga organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2019). Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan lokasi implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT Tirta Investama Solok (*Danone-AQUA*) yang berfokus pada konservasi kebun kopi.

Nagari Batang Barus dipilih karena secara sosiologis mencerminkan dinamika partisipasi masyarakat yang kompleks. Di satu sisi, program CSR konservasi kebun kopi telah berjalan dengan melibatkan sebagian warga. Namun, di sisi lain, terdapat partisipasi terbatas, serta ketegangan sosial yang muncul akibat kepercayaan sosial yang belum sepenuhnya terbentuk terhadap aktor-aktor pelaksana program, baik perusahaan maupun mitra pelaksana seperti *Human Initiative*.

1.6.11 Rencana Penelitian

Penelitian ini berjalan selama sepuluh bulan, dimulai dari bulan September 2025 hingga Juli 2026. Berikut merupakan tahapan penelitian yang dilaksanakan.

Tabel 1. 5 Jadwal Penelitian

N o.	Nama Kegiatan	2025				2026							
		September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Seminar Proposal.												
2	Membuat instrument penelitian, membuat pedoman penelitian, penelitian lapangan.												
3	Analisis data dan penulisan laporan penelitian												
4	Sidang Skripsi												

